

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK

PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2023



MEDAN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam dokumen ini terdapat beberapa capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama 1 tahun kebelakang serta hal – hal apa yang akan dilakukan kedepannya. Untuk Tahun Anggaran 2023 yang merupakan tahun ke 5 (kelima) atau tahun akhir pencapaian target visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode 2019 sd 2023 bergantung kepada pencapaian target dan realisasi dari Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana kita ketahui bahwa visi “ Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat” memiliki 5 (lima) misi didalamnya yakni :

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang dan pangan yang cukup, ramah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan serta harga- harga yang terjangkau
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri
4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berkeprimanusiaan dan beradab

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diberikan target untuk mencapainya dan ini tertuang dalam dokumen Perencanaan di masing – masing OPD baik itu Rencana Strategis ataupun Rencana Kerja setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2023 yang merupakan akhir dari perodesasi RPJMD apa yang diharapkan dapat tercapai demi terwujudnya Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat.

Disamping berpedoman kepada visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut, dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara juga mempedomani dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam dokumen tersebut terdapat Program Prioritas yang tentunya harus disesuaikan dengan dokumen Perencanaan di masing – masing OPD, demikian halnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

Mulai Tahun Anggaran 2021 dalam Penyusunan Anggaran dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang terintegrasi ke seluruh wilayah, melalui sistem ini diharapkan adanya keseragaman penyusunan anggaran di seluruh wilayah Indonesia. Dalam penyusunan anggaran tersebut juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam peraturan ini terdapat perubahan urusan seperti Kesbangpol yang tadinya masuk kedalam Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum mengalami perubahan menjadi Urusan Pemerintahan Umum.

Perlu juga menjadi perhatian bersama wabah virus Covid - 19 yang terjadi dari tahun 2019 lalu membuat terhambatnya pelaksanaan beberapa program dan kegiatan di tahun sebelumnya, sampai saat ini masih terus berlangsung walaupun sudah menurun angka penularannya namun diharapkan dapat segera berjalan seperti biasa kembali.

Pada tanggal 17-18 Februari 2022 bertempat di Hotel Grand Kanaya Medan telah dilaksanakan Rapa Koordinasi OPD Bakesbangpol Kab/Kota Se Sumatera Utara. Pada rapat ini telah dipaparkan target program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi kepada Kab/Kota agar dapat disesuaikan dan diteruskan pelaksanaannya terutama berfokus pada Program Kegiatan Strategis Daerah yaitu Penguatan Pusat Wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kebebasan berpendapat, berserikat dan bebas diskriminasi di Provinsi Sumatera Utara dan Pembangunan 300 Kampung Bersinar. Bakesbagpol Provsu berharap agar Bakesbangpol Kab/Kota fokus mengalokasikan penganggaran tahun 2023 pada kegiatan strategis tersebut, selain itu persiapan PILKADA Tahun 2024 yang serentak akan sangat menyedot anggaran, Kesbangpol di Kabupaten kota menyarankan dan memohon perhatian terkait pemberian bantuan dana PILKADA ke Kab/Kota dari Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Bakesbangpol Provsu akan merumuskan mana saja yang akan menjadi wewenang Provinsi oleh KPU sesuai hasil dari koordinasi KPU Provinsi dengan Kab/Kota.

1.2 Landasan Hukum

Didalam penyusunan dokumen Rencana Awal Kerja Tahun Anggaran 2023 ini terdapat beberapa landasan hukum yang menjadi pedoman yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Landasan Operasional, terdiri dari :
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –Undangan, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;

- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pengganti Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ;
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan konflik Sosial;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
- Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
- Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara;
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tugas Kepala Daerah, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembauran Kebangsaan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan pariwisata Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai – Nilai Pancasila;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Ijin Penelitian;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ;
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 ;
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Provinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa / Kelurahan Provinsi Sumatera Utara;
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan FPK Kab / Kota di Sumatera Utara;

- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara;
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2022 Tentang RKPD Tahun 2023;
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.8.44 / 576 / KPTS 2016 Tanggal 27 September 2016 Tentang Forum Pembauran Kebangsaan;
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188. 44 / 1300 / KPTS 2018 Tanggal 3 Oktober 2018 Tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Awal Kerja ini adalah sebagai dasar perencanaan program / kegiatan yang akan ditampung pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 serta sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun sebelumnya .

Selanjutnya untuk tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 ini, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang pembuatan Renja, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara

dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan uraian singkat tentang Sistematika Penyusunan Renja. Adapun sub Bab ini terdiri dari :

- Latar Belakang
- Landasan Hukum
- Maksud dan Tujuan
- Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab II ini memuat hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi pada tahun lalu sehingga dapat diperoleh saran / masukan untuk perbaikan penyelenggaraan kinerja kedepan. Adapun sub Bab ini terdiri dari :

- Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra OPD
- Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Bab ini dipaparkan tujuan / sasaran OPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik Provinsi Sumatera Utara yang didukung dari program dan kegiatan yang telah disusun dengan melihat dan mensinkronisasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

- Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Pada Bab ini akan diuraikan tentang sejauh mana pelaksanaan Program / Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun lalu sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provsu. Data Evaluasi ini merupakan Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja OPD dan Pencapaian Rencana Kerja Tahun 2021 yang lalu.

Mulai Tahun Anggaran 2021 sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, alokasi anggaran tersebut diperuntukkan pada Program / Kegiatan sebagai berikut:

- **Sekretariat**
Terdapat 1 Program yaitu PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI dengan 6 (enam) Sub Program Kegiatan, dan 17 (tujuh belas) rincian kegiatan rutin dan seluruhnya terlaksana dengan baik.
- **Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa**
Pada bidang ini terdapat 1 (satu) Program yaitu PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN dengan 3 (tiga) sub kegiatan didalamnya. Keseluruhan Kegiatan yang ada dimasukkan untuk mendukung pencapaian Indikator Presentase Masyarakat Yang Menerima Pemahaman Wawasan Kebangsaan dengan target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 adalah 2000 orang dan untuk realisasinya 1450 orang atau 70% sedangkan Target tahun 2022 adalah 1275 Orang dengan realisasi sebanyak 1550 orang atau 100% tercapai .
- **Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional**
Pada bidang ini terdapat 1 (satu) Program yaitu PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL dengan 2 (dua) sub kegiatan didalamnya. Keseluruhan Kegiatan yang ada dimasukkan untuk mendukung pencapaian Indikator Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi dengan target peringkat 8 (delapan),

namun peringkat Nasional hasil evaluasi periode Tahun 2021 Sumatera Utara berada pada Peringkat 15 atau tidak tercapai target, tetapi untuk Tahun 2022 tercapai sesuai target dengan peringkat 8.

- Bidang Politik Dalam Negeri

Terdapat 1 (satu) Program yaitu PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK dengan 4 (empat) sub kegiatan didalamnya, target Perjanjian Kinerja Persentase Partisipasi pemilih sebesar 64 % dengan realisasi tetap seperti tahun 2020 di tahun 2021 yaitu 64,42 %, pada tahun 2022 terjadi perubahan indikator yaitu menjadi Jumlah Pelopor Pemilih cerdas dengan target 425 orang dan tercapai 100% lebih yaitu 600 orang yang telah mengikuti rakor, sosialisasi dan pendidikan politik.

- Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

Terdapat 2 (dua) Program yaitu PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA dengan 2 (dua) sub kegiatan didalamnya dan PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN dengan 3 (tiga) sub kegiatan didalamnya. Tahun 2021 yang menjadi indikator masih berada pada target yang ditetapkan adalah 20 Ormas setiap tahunnya dengan indikator Persentase penambahan ormas. Untuk realisasi pencapaian target pada tahun 2021 mencapai 370 % atau ada penambahan menjadi sebesar 74 ormas, Tahun 2022 berubah indikator yaitu menjadi Jumlah Pembinaan Ormas aktif dengan target 40 ormas dan tercapai lebih 100% dengan jumlah 120 ormas yang aktif dan terbina. Sedangkan untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya terdapat indikator baru di tahun 2022 yaitu Menahan Laju angka prevalensi pengguna narkoba di Sumut dengan pendidikan bahaya narkoba dengan target menjadi 5,9 % namun masih belum tercapai yaitu masih berada pada angka 6,5 % sejak tahun 2020.

Dari data yang ada, dapat dijelaskan bahwa dari total anggaran Badan Kesbangpol Provsu tahun 2021 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 38.130.532.164,- dengan perincian untuk belanja Operasi sebesar Rp. 36.861.012.764,- terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 10.430.932.924,-, Belanja Barang Jasa Rp. 17.138.811.440,- dan Belanja Hibah

Rp. 9.291.268.400,-, serta Belanja Modal Rp. 1.249.519.400,-. Dari total anggaran tersebut yang terealisasi sebesar Rp. 34.848.473.440,- atau 91,44 % dengan perincian untuk belanja Operasi sebesar Rp. 33.636.706.290,- sedangkan belanja Modal sebesar Rp. 1.211.767.150,- Pada Tahun 2022 Realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 75.314.882.276,- atau 96,37 % dari total pagu anggaran Rp. 78.148.403.200,-.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2021 masih diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang susunan organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara terdapat Uraian tentang Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional, politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan
- Pemberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional, politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional, politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan
- Pelaksanaan tugas pembantu di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- Pelaksanaan pelayanan administrasi Internal dan Eksternal
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

Untuk Forum – Forum yang ada di Kesbangpol, dapat dijelaskan bahwa ada 4 yang ada di Kesbangpol Provsu. Untuk 3 Forum dimaksud adalah : Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Pelestarian Budaya (FPB). Khusus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) seluruh Kabupaten / Kota sudah membentuk Forum ini, untuk Forum yang lain masih ada beberapa kab/kota yang belum membentuknya.

Disamping Forum - Forum tersebut, sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota diwajibkan untuk membentuk Tim ini untuk :

1. Mengoptimalkan Pengembangan dan Pelaksanaan Nilai Kebangsaan guna Pemberdayaan dan Penguatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara yang berlandaskan pada Nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mengoptimalkan Pengembangan dan Perbaikan Kinerja Demokrasi Daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia
3. Mengembangkan dan Melaksanakan Model PWK yang tidak Indoktrinatif dan sesuai dengan Kearifan Lokal
4. Memfasilitasi Proses Pembentukan Simpul PWK
5. Memberikan Usulan Perubahan Kebijakan yang terkait dengan masalah Kebangsaan; dan
6. Membangun Jaringan Kerjasama dengan Berbagai Pihak untuk Pengembangan PWK Tingkat Lokal, Nasional, dan Regional sesuai Peraturan Perundangan.

Atas hal tersebut diatas, dan mengingat intensitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesbangpol kedepannya maka diharapkan tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai seperti peralatan dan perlengkapan kantor maupun Gedung Kantor yang memadai sehingga pelaksanaan Tugas dan Fungsi dapat lebih optimal.

Berikut table Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu dengan format Tabel T.C. 30 sebagai berikut :

Tabel T.C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.	Masyarakat yang menerima wawasan kebangsaan	Memberi Pemahaman dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan kepada Masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia	260 Orang	1275 Orang	1300 Orang	1459 Orang	1550 Orang	1300 Orang	Target Tahun 2021 Tercapai, Tahun 2022 masih berjalan saat disusun rancangan akhir Renja 2023
2.	Jumlah Pelopor pemilih cerdas	Memberikan Pemahaman dan Pendidikan tentang Politik serta pentingnya menggunakan	Indeks Demokrasi Indonesia	400 Orang	425 Orang	550 Orang	450 Orang	600 Orang	550 Orang	Target Tahun 2021 Tercapai,

		hak suara dalam pemilihan kepada Masyarakat								Tahun 2022 masih berjalan saat disusun rancangan akhir Renja 2023
3.	Jumlah Pembinaan Ormas Aktif	Melakukan Pemantauan Monitoring dan Evaluasi terhadap Ormas	Indeks Demokrasi Indonesia	30 Ormas	40 Ormas	50 Ormas	74 Ormas	120 Ormas	50 Ormas	Target Tahun 2021 Tercapai, Tahun 2022 masih berjalan saat disusun rancangan akhir Renja 2023
4.	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	Mendeteksi dini isu isu penyebab konflik dan menyelesaikan konflik yang sudah terjadi	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Peringkat 8	Peringkat 8	Peringkat 7	Peringkat 18	Peringkat 8	Peringkat 7	Target Tahun 2021 Tidak Tercapai, Tahun 2022 tercapai

5.	Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna Narkoba di Sumut	Memberi Pemahaman dan Pendidikan akan bahaya narkoba kepada masyarakat dan memberi pelatihan keahlian tenaga kerja (lifeskill) bagi mantan pecandu narkoba	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	6,1 %	5,9 %	5,7%	6,5 %	6.5%	5,7%	Target Tahun 2021 Tidak Tercapai, Tahun 2022 Tidak Tercapai

Berikut pula Tabel Target dan Realisasi beserta strategi percepatannya dalam 3 tahun terakhir (Tahun 2019-2021).

No	Indikator Sasaran	Target			Realisasi			Strategi	Kegiatan Prioritas Pendukung Pencapaian Target
		2019	2020	2021	2019	2020	2021		
1	Indeks Demokrasi Indonesia	-	-	72,99	67,65	65,13	77,6	Keterbukaan Informasi Publik, Merekapitulasi secara berkala rekomendasi DPRD Sumut sebagai perbaikan indikator 22 dan menjalin kemitraan dengan instansi vertikal sesuai tupoksi masing masing	Penguatan kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia Sumut
2	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	65	68	92	97	90,25	(Belum ada data)	Memberikan Pendidikan Masyarakat terkait deteksi dini Konflik Sosial, Serta berkoordinasi penuh dengan Tim aparat di Daerah	Percepatan Penanganan Konflik, Pembentukan PUSKOMIN dengan Kab/Kota, Koordinasi dengan Instansi Terakut Isu-isu Keamanan Daerah
No	Indikator Utama	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Strategi	Kegiatan Prioritas Pendukung Pencapaian Target
1	Masyarakat yang menerima wawasan kebangsaan	-	-	260	1300 org	0 (efisiensi anggaran untuk covid)	1459 org	Memberi Pemahaman dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan kepada Masyarakat	Sosialisasi Revolusi Mental, Peringatan Hari Bela Negara, Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan serta Fasilitasi Forum Pembauran 2Kebangsaan
2	Jumlah Pelopor pemilih cerdas	300	350	400	400 org	0 (efisiensi anggaran untuk covid)	450 org	Memberikan Pemahaman dan Pendidikan tentang Politik serta pentingnya menggunakan hak suara dalam pemilihan kepada Masyarakat	Sosialisasi pendidikan politik, Hibah Bantuan Parpol, Penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Provsu, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik Daerah
3	Jumlah Pembinaan Ormas Aktif	20	20	30	31	85	74	Melakukan Pemantauan Monitoring dan Evaluasi terhadap Ormas	supervisi tim terpadu pengawasan Ormas di Provsu/Verifikasi Pendaftaran, Pendataan Ulang, Evaluasi dan Supervisi bantuan Dana Hibah

									Bagi Ormas dan Asistensi bagi ASN Kab/Kota Tentang Ormas, Hibah Ormas.
4	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	9	9	9	9	10	18	Mendeteksi dini isu isu penyebab konflik dan menyelesaikan konflik yang sudah terjadi	Melaksanakan PUSKOMIN, Fasillitasi FORKOPIMDA, Sosialisasi Cipta Kondisi kepada Masyarakat, Fasilitasi FKDM, dan Rapat koordinasi terkait Pemantauan Orang Asing dan Penanganan Konflik.
5	Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna Narkoba di Sumut	6.5	6.3	6.1	6,5	6,5	6,5	Memberi Pemahaman dan Pendidikan akan bahaya narkoba kepada masyarakat dan memberi pelatihan keahlian tenaga kerja (lifeskill) bagi mantan pecandu narkoba	Sosialisasi Bahaya Narkoba, Rapat koordinasi Tim P4GN, Pelatihan Lifeskill kepada mantan pecandu, Desa Bersinar, pemberian bantuan biaya rehabilitasi narkoba bagi keluarga tidak mampu

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD

Beberapa isu strategis yang berkaitan dengan Bakesbangpol Provsu adalah sebagai berikut :

1. Keragaman masyarakat Sumatera Utara baik dari Suku, Agama, Ras, Antar Golongan perlu tetap dijaga oleh karena itu diperlukan pemberdayaan kepada Forum - Forum Strategis yang ada seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), ForumPembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Tim Pelestarian Budaya, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota, sehingga wajib menjadi perhatian kita agar selalu menjaga sinkronisasi dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota.
2. Salah satu hal yang menjadi perhatian pada era globalisasi saat ini adalah berkaitan dengan penyetaraan gender, oleh karena itu Kesbangpol juga memperhatikan isu gender ini sebagai bagian dari penyusunan dokumen

Perencanaan OPD, dan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengusulkan kegiatan dengan menggunakan analisis gender didalamnya.

3. Ditengah peristiwa pandemi Covid 19 vaksin menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi virus Covid 19 yang telah ada di masyarakat. Hal ini menjadi dukungan kita bersama dalam bentuk pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran virus Covid 19 serta bagaimana hidup berdampingan dengan virus tersebut (*new normal*) di masyarakat.
4. Hasil Data BNN (Badan Narkotika Nasional) dan BPS (Badan Pusat Statistik), Sumatera Utara merupakan peringkat 1 (pertama) penggunaan Narkotika di Indonesia. Sebagai OPD yang membidangi program ketahanan ekonomi, sosial dan ekonomi, Bakesbangpol berkoordinasi dan bekerjasama dengan BNN dan tim Aparat serta OPD terkait keamanan lainnya berusaha meningkatkan pencegahan dan penanggulangan untuk menahal tingkat prevalensi pengguna Narkoba di Sumatera Utara.

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah ditengah Pandemi Covid-19 dibangun optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mengawal program prioritas nasional Presiden dibutuhkan pola pendekatan baru, cara kerja baru, inovasi baru salah satunya melalui pendekatan teknologi informasi, untuk itu ke depan cara kerja baru kita adalah melalui Teknologi Informasi yang terkoneksi di 33 Kab/Kota. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain sinkronisasi program dan kegiatan dan kemampuan sumberdaya manusia, hal ini berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals).

Dalam pelaksanaan program prioritas nasional dan daerah ini tentu saja tidak akan dapat berjalan maksimal jika hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, untuk itu dibutuhkan dukungan oleh pemerintah daerah Kabupaten dan Kota melalui sinkronisasi program dan kegiatan di daerah antara lain melalui penguatan Regulasi di bidang Perencanaan dan Penganggaran dengan pencatuman urusan kesbangpol di dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman

Penyusunan APBD TA. 2022 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Serta penguatan Kelembagaan kesbangpol melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas kita dihadapkan dalam berbagai macam persoalan bangsa dan negara yang harus kita tangani dengan baik sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan, setidaknya ada 8 (delapan) isu isu strategis yang menjadi perhatian kita yang membutuhkan formulasi yang dimuat dalam program dan kegiatan antara lain :

1. Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional;
2. Kecenderungan peningkatan konflik sosial;
3. Terorisme dan radikalisme;
4. Perubahan perilaku sosial masyarakat sebagai dampak teknologi dan informasi;
5. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
6. Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan;
7. Kualitas demokrasi; dan
8. Melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam melakukan perbandingan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan maka dari hasil isu isu strategis yang menjadi perhatian kita, maka efektifitas sasaran kegiatan dan lokasi pelaksanaan kegiatan juga menjadi perhatian terutama pada pencegahan dan penanggulangan pengguna Narkoba. Bakesbangpol membuat inovasi dengan menambahkan beberapa jenis kegiatan baru yaitu membuat pelatihan keterampilan lifeskill bagi mantan pecandu narkoba, pelatihan/konselor adiksi korban penyalahgunaan NAPZA, fasilitasi test urin bagi ASN dan Masyarakat serta Fasilitasi Biaya Rehabilitasi

Narkoba untuk keluarga tidak mampu, serta yang merupakan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) adalah kegiatan Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba).

Selain itu dalam peningkatan pencegahan konflik sosial Bakesbangpol kembali melaksanakan PUSKOMIN (Pusat komunikasi dan Informasi) untuk berkoordinasi dengan Tim Aparat Keamanan serta memfasilitasi pertemuan koordinasi FORKOPIMDA.

Selanjutnya perubahan jumlah Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 dari Rp. 1.200,- menjadi Rp. 5.000,- per suara yang otomatis juga merubah jumlah struktur anggaran dibandingkan dari Rancangan awal RKPD.

Kegiatan Revolusi Mental yang merupakan salah satu Program Prioritas Nasional yang wajib kita teruskan ke tingkat Daerah juga menjadi salah satu kegiatan prioritas Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara yang rinciannya terdiri atas Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Sosialisasi Wawasan kebangsaan kepada masyarakat, Sosialisasi Gerakan Sumut Bersih di Kawasan Wisata, serta kegiatan Bela Negara.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel T.C.31 (Tabel 2.4) dibawah ini :

Tabel T. C. 31 (Tabel 2.4)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Provinsi Sumatera Utara

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Terciptanya Pelayanan Administrasi Pekantoran	SAKIP BB	17.324.703.640	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Terciptanya Pelayanan Administrasi Pekantoran	SAKIP BB	18.981.168.194	
1	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpol		12 BULAN	100.000.000	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpol		12 BULAN	430.625.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perencanaan	9 dokumen	430.625.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kesbangpol		12 BULAN	12.124.703.640	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kesbangpol		12 BULAN	12.259.802.110	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kesbangpol	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN	100%	11.328.503.640	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kesbangpol	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN	100%	11.328.503.640	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kesbangpol	Jumlah Tenaga Pendukung Pelaksana Tugas	12 Orang	600.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kesbangpol	Jumlah Tenaga Pendukung Pelaksana Tugas	14 Orang	721.778.470	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan	3 dokumen	196.200.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan	3 dokumen	209.520.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kesbangpol		5 kali	120.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kesbangpol		5 kali	228.025.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kesbangpol	Frekuensi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	5 kali	120.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kesbangpol	Frekuensi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	6 kali	228.025.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kesbangpol		12 BULAN	2.250.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kesbangpol		12 BULAN	2.582.315.200	

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kesbangpol	Persentase Komponen Instalasi Listrik dan Jaringan	100%	120.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kesbangpol	Persentase Komponen Instalasi Listrik dan Jaringan	100%	138.834.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesbangpol	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	300.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesbangpol	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	763.481.200	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kesbangpol	Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	100%	550.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kesbangpol	Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	100%	550.000.000	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kesbangpol	Persentase Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	150.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kesbangpol	Persentase Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	150.000.000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kesbangpol	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	100%	30.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kesbangpol	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	1 koran	30.000.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kesbangpol	Persentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	1.100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kesbangpol	Persentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	950.000.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kesbangpol		12 BULAN	1.180.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kesbangpol		12 BULAN	1.180.524.484	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Benda Pos Jasa Surat Menyurat	100%	30.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Benda Pos Jasa Surat Menyurat	100%	30.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kesbangpol	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100%	500.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kesbangpol	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100%	500.534.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kesbangpol	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 orang	650.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kesbangpol	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	14 Orang	649.990.484	
6	Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kesbangpol		12 BULAN	1.550.000.000	Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kesbangpol		12 BULAN	2.299.876.400	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kesbangpol	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	10 unit	350.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kesbangpol	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	10 unit	350.000.000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kesbangpol	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100%	200.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kesbangpol	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100%	250.000.000	

3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kesbangpol	Jumlah Bangunan kantor yang direhabilitasi	1 gedung	1.000.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kesbangpol	Jumlah Bangunan kantor yang direhabilitasi	1 Gedung	1.699.876.400	
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kesbangpol	Tersedianya kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi dan Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1275 orang	7.785.000.000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kesbangpol	Tersedianya kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi dan Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1275 orang	6.299.922.990	
7	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah Program Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	1 dokumen	350.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah Program Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	1 Dokumen	299.998.000	
8	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah Forum yang difasilitasi	1 forum	1.500.000.000	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah Forum yang difasilitasi	1 forum	999.999.000	
9	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah Peserta Perumusan Penyusunan Reaktualisasi Nilai nilai Pancasila	200 Orang	225.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah Peserta Perumusan Penyusunan Reaktualisasi Nilai nilai Pancasila	200 Orang	174.999.990	
10	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah Jumlah Kegiatan Revolusi Mental	3 kali/ 1275orang	3.500.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah Jumlah Kegiatan Revolusi Mental	3 Kali/ 1500 Orang	3.000.000.000	

11	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan	12 bulan	2.210.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan	12 Bulan	1.824.926.000	
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kesbangpol	Tersedianya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemili han Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	450 Orang	1.061.600.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kesbangpol	Tersedianya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemili han Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	450 orang	41.130.000.000	
12	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantaua Situasi Politik Daerah	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Bahan Perumusan Penyusunan Indeks Demokrasi Sumatera Utara dan Buku Pemetaan Politik Sumatera Utara	2 dokumen	400.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantaua Situasi Politik Daerah	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Bahan Perumusan Penyusunan Indeks Demokrasi Sumatera Utara dan Buku Pemetaan Politik Sumatera Utara	2 Dokumen	1.500.000.000	

13	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantaua Situasi Politik Daerah	Kesbangpol	Jumlah Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPRD Sumatera Utara	11 parpol	11.600.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantaua Situasi Politik Daerah	Kesbangpol	Jumlah Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPRD Sumatera Utara	11 Parpol	33.630.000.000	
14	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penignkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah orang yang mendapatkan Pendidikan Politik	33 kab/kota	400.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penignkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah orang yang mendapatkan Pendidikan Politik	450 orang	4.000.000.000	
15	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penignkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemilu dan Forum Komunikasi Dengan Partai Politik	2 kali	250.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penignkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemilu dan Forum Komunikasi Dengan Partai Politik	2 kali	2.000.000.000	
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kesbangpol	Jumlah Pembinaan Organisasi Masyarakat yang Aktif	40 Ormas	4.595.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kesbangpol	Jumlah Pembinaan Organisasi Masyarakat yang Aktif	40 ormas	12.551.645.000	
16	Penyusunan Baha Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol	Peserta yang difasilitasi Bidang Ormas	60 Orang	66.000.000	Penyusunan Baha Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol	Peserta yang difasilitasi Bidang Ormas	50 Orang	100.000.000	

17	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol	Kegiatan Pelaksanaan di Bidang Ormas	3 kali	4.386.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol	Kegiatan Pelaksanaan di Bidang Ormas	40 ormas ; 40 angkatan	12.249.246.000	
18	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol	Frekuensi Monitoring dan Pelaporan Terkait Ormas	12 Bulan	143.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol	Frekuensi Monitoring dan Pelaporan Terkait Ormas	12 Bulan	202.399.000	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Kesbangpol	Tersedianya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	5,7 %	28.395.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Kesbangpol	Tersedianya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	5,7 %	69.674.776.000	
19	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Forum Yang Difasilitasi	2 Forum	2.250.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Forum Yang Difasilitasi	2 Forum	1.499.999.500	
20	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba kepada Masyarakat dan Jumlah Peserta Sosialisasi Tatanan Kehidupan Baru dan Desa Bersih dari Narkoba	5,7 %	26.065.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba kepada Masyarakat dan Jumlah Peserta Sosialisasi Tatanan Kehidupan Baru dan Desa Bersih dari Narkoba	5,7 %	68.099.959.000	

21	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	Termonitornya kegiatan terkait Narkoba dan Forum yang terkait	12 bulan	80.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol	Termonitornya kegiatan terkait Narkoba dan Forum yang terkait	12 Bulan	74.817.500	
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kesbangpol	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	8 peringkat	4.400.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kesbangpol	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	8 peringkat	13.223.655.000	
22	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Tersedianya Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan dini kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah. Dan Tersedianya Informasi tentang Bahaya Radikalisme dan Terorisme	1 Tim ; 2 kegiatan (Komite Intelijen Daerah)	600.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Tersedianya Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan dini kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah. Dan Tersedianya Informasi tentang Bahaya Radikalisme dan Terorisme	1 Tim ; 2 kegiatan (Komite Intelijen Daerah)	8.821.425.000	

23	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Terlaksananya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	1 dokumen	600.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Terlaksananya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Bulan (Fasilitasi Forkopimda)	2.363.130.000	
24	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Terlaksananya monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Bulan	600.000.000	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Terlaksananya monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Tim; 12Bulan (Penanganan Konflik Sosial, Satgas Pengungsi, Puskomin)	1.536.050.000	
25	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Terlaksananya Kebijakandi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	12 bulan	2.000.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Terlaksananya Kebijakandi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	2 Kegiatan (Konflik Sosial dan Pemantauan Orang Asing)	298.750.000	

			Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah					Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah			
26	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Kegiatan dalam rangka pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan dini kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah. Dan Terlaksananya kegiatan Penanganan Konflik Sosial	2 kegiatan/ 12 bulan	600.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Kegiatan dalam rangka pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan dini kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah. Dan Terlaksananya kegiatan Penanganan Konflik Sosial	12 Bulan	204.300.000	
					63.561.303.640					161.861.167.184	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menampung dan menerima aspirasi masyarakat terkait penyusunan Program / Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 ini, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara menampung usulan Kab/Kota melalui desk Musrembang yang telah dilaksanakan berdasarkan pembagian Zona dan hasil Reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Pada hasil Musrenbang lalu, ada beberapa usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota juga ada beberapa Pokok Pikiran yang dituang oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara (dapat dilihat pada Tabel 3.1), usulan tersebut akan menjadi bahan utama kami dalam penyusunan program dan kegiatan terutama pada lokus dan disesuaikan dengan kondisi anggaran.

Disamping hal tersebut usulan program juga mempedomani prioritas pembangunan nasional dan capaian terhadap visi misi kepala daerah serta dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.

Tabel TC-32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVSU

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	Pembinaan dan Pengawasan keberadaa an dan Aktivitas Organisasi kemasyaraka tan yang aktif di Labuhanbatu Utara	KAB. LABUHANBATU UTARA	Jumlah Pembinaan Ormas Aktif	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
2	Sosialisasi Dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Hukumannya kepada Pelajar dan Masyarakat Roadshow ke Sekolah - Sekolah	KOTA TANJUNG BALAI	Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna Narkoba di Sumut	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
3	PEMBANGUNAN KAMPUNG BERSINAR (BERSIH NARKOBA)	KOTA TEBING TINGGI	Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna Narkoba di Sumut	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
4	Pemberdayaan Kampung Bersinar	KOTA TANJUNG BALAI	Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna Narkoba di Sumut	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah

5	Sosialisasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan terhadap Generasi Muda	KAB. DELI SERDANG	Masyarakat yang menerima wawasan kebangsaan	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
6	Orientasi dan Pengayaan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila terhadap Generasi Muda	KAB. DELI SERDANG	Masyarakat yang menerima wawasan kebangsaan	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
7	Pembangunan Kampung Bersinar	KAB. LABUHANBATU	Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna Narkoba di Sumut	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
8	Biaya Rehabilitasi Masyarakat/Warga 150 orang warga Kota Medan 20 Titik Kelurahan Rawan Narkoba (Bersinar)	KOTA MEDAN	Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna Narkoba di Sumut	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
9	Sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat	KAB. LABUHANBATU UTARA	Jumlah Pelopor pemilih cerdas	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
10	Sosialisasi Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat dalm Bentuk Partisipasi	KOTA TANJUNG BALAI	Jumlah Pelopor pemilih cerdas	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi

	Pemilu 2024 kepada ASN, Tokoh Masyarakat, Agama, Adat dan Ormas dan Roadshow ke Sekolah - Sekolah (Pemilih Pemula SMS-sederajat)				keuangan Daerah
11	Pembangunan Kampung BERSINAR (Bersih Narkoba)	KAB. SERDANG BEDAGAI	Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna Narkoba di Sumut	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
12	Fasilitasi Pelatihan Wawasan Kebangsaan bagi ASN	KOTA TANJUNG BALAI	Masyarakat yang menerima wawasan kebangsaan	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
13	Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	KAB. DELI SERDANG	Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna Narkoba di Sumut	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
14	Pembangunan desa kampung bersinar di kabupaten labuhanbatu utara	KAB. LABUHANBATU UTARA	Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna Narkoba di Sumut	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
15	Sosialisasi/pembinaan dan pengawasan	KAB. LABUHANBATU	Menahan Laju	1 kali kegiatan	Disesuaikan

	generasi muda, pemuda dan pelajar terhadap bahaya narkoba di kabupaten labuhanbatu utara	UTARA	Angka Prevalensi pengguna Narkoba di Sumut		dengan kondisi keuangan Daerah
16	Lokakarya Manajerial bagi Pimpinan Ormas	KAB. DELI SERDANG	Jumlah Pembinaan Ormas Aktif	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
17	SOSIALISASI KARAKTER BANGSA BAGI PEMUDA, PELAJAR DAN MASYARAKAT	KAB. PADANG LAWAS UTARA	Masyarakat yang menerima wawasan kebangsaan	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
18	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai Luhur Budaya Bangsa	KAB. PADANG LAWAS	Masyarakat yang menerima wawasan kebangsaan	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
19	Gugus Tugas Gerakan Revolusi Mental Kabupaten Padang Lawas	KAB. PADANG LAWAS	Masyarakat yang menerima wawasan kebangsaan	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
20	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap	KAB. PADANG LAWAS	Menahan Laju Angka Prevalensi	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi

	Narkoba (P4GN)		pengguna Narkoba di Sumut		keuangan Daerah
21	Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan	KAB. PADANG LAWAS	Masyarakat yang menerima wawasan kebangsaan	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
22	Sosialisasi 4 Konsensus Dasar bagi Masyarakat	KAB. PADANG LAWAS	Masyarakat yang menerima wawasan kebangsaan	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
23	Pembekalan Pelatihan Tenaga Penyuluh P4GN	KAB. PADANG LAWAS	Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna Narkoba di Sumut	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
24	Penguatan Wawasan Kebangsaan Sebagai Upaya Pencegahan Paham Radikalisme Dan Intoleransi Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Swasta	KOTA PADANGSIDIMP UAN	Masyarakat yang menerima wawasan kebangsaan	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
25	Workshop Empat Pilar Kebangsaan Bagi Organisasi Kemasyarakatan Dan Partai	KOTA PADANGSIDIMP UAN	Jumlah Pembinaan Ormas	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi

	Politik		Aktif		keuangan Daerah
26	Desa Bersinar	KAB. PADANG LAWAS UTARA	Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna Narkoba di Sumut	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
27	Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	KAB. MANDAILING NATAL	Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna Narkoba di Sumut	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
28	Pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	KAB. MANDAILING NATAL	Masyarakat yang menerima wawasan kebangsaan	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
29	Pembangunan Kampung bersinar (bersih Narkoba)	KOTA SIBOLGA	Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna Narkoba di Sumut	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah

30	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	KAB. PADANG LAWAS	Masyarakat yang menerima wawasan kebangsaan	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
31	SOSIALISASI WAWAWASAN KEBANGSAAN BAGI PEMUDA , PELAJAR DAN MASYARAKAT	KAB. PADANG LAWAS UTARA	Masyarakat yang menerima wawasan kebangsaan	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
32	PENDIDIKAN BELA NEGARA BAGI PEMUDA, PELAJAR DAN MASYARAKAT	KAB. PADANG LAWAS UTARA	Masyarakat yang menerima wawasan kebangsaan	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
33	SOSIALISASI 4 (Empat) PILAR KEBANGSAAN BAGI PEMUDA, PELAJAR DAN MASYARAKAT -UUD 1945 -NKRI - BHINNEKA TUNGGAL IKA - PACASILA	KAB. PADANG LAWAS UTARA	Masyarakat yang menerima wawasan kebangsaan	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
34	Integrasi Nilai-Nilai Bela Negara Bagi Naposo Nauli Bulung Sebagai Upaya Meningkatkan Pentingnya Suasana Rukun, Damai, Dan Aman Dalam	KOTA PADANGSIDIMPUAN	Masyarakat yang menerima wawasan kebangsaan	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah

	Masyaraka t				
35	SOSIALISASI P4GN	KAB. PADANG LAWAS UTARA	Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna Narkoba di Sumut	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
36	Penyuluhan tentang bahaya Narkoba dalam mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Simalungun Peserta : Kec. Perdagangan, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kec. Tapian Dolok, Kec. Jorlang Hataran	KAB. SIMALUNGUN	Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna Narkoba di Sumut	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
37	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	KAB. TOBA	Masyarakat yang menerima wawasan kebangsaan	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
38	Pendidikan Politik bagi Masyarakat	KAB. TOBA	Jumlah Pelopor pemilih cerdas	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
39	Pembangunan kampung bersinar	KAB. SAMOSIR	Menahan Laju Angka Prevalensi	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi

			pengguna Narkoba di Sumut		keuangan Daerah
40	Pendidikan wawasan kebangsaan	KAB. SAMOSIR	Masyarakat yang menerima wawasan kebangsaan	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
41	Penyuluhan Pemahaman Wawasan Kebangsaan pada Generasi Muda	KAB. SIMALUNGUN	Masyarakat yang menerima wawasan kebangsaan	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
42	Penyuluhan Etika berpolitik Masyarakat	KAB. SIMALUNGUN	Jumlah Pelopor pemilih cerdas	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
43	Peningkatan Koordinasi dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	KAB. SIMALUNGUN	Jumlah Pembinaan Ormas Aktif	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
44	Kampung bersinar (bersih narkoba)	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah

			Narkoba di Sumut		
45	Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental	KAB. TOBA	Masyarakat yang menerima wawasan kebangsaan	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
46	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba (P4GN)	KAB. KARO	Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna Narkoba di Sumut	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
47	Pembangunan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)	KAB. DAIRI	Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna Narkoba di Sumut	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
48	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Di Wilayah Kabupaten Nias Barat	KAB. NIAS BARAT	Masyarakat yang menerima wawasan kebangsaan	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah
49	Pencanangan 1 Kampung Bersinar (Bersih Narkoba) Di Kabupaten Nias Barat	KAB. NIAS BARAT	Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna Narkoba di Sumut	1 kali kegiatan	Disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah

Lampiran:

USULAN PRA MUSRENBANG KABUPATEN KOTA

Lampiran Usulan Musrenbang Tahun 2023

Lampiran Usulan Musrenbang Tahun 2023

Tahun	Tahapan	Kab/Kota	PD Provinsi	PD Kab/Kota	Zona	Usulan	Keterangan
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. LABUHANBATU UTARA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan politik	Zona 1 (Pantai Timur)	Pembinaan dan Pengawasan keberadaan dan Aktivitas Organisasi kemasyarakatan yang aktif di Labuhanbatu Utara	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KOTA TANJUNG BALAI	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Zona 1 (Pantai Timur)	Sosialisasi Dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Hukumannya kepada Pelajar dan Masyarakat Roadshow ke Sekolah - Sekolah	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KOTA TEBING TINGGI	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi	Zona 1 (Pantai Timur)	PEMBANGUNAN KAMPUNG BERSINAR (BERSIH NARKOBA)	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KOTA TANJUNG BALAI	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Zona 1 (Pantai Timur)	Pemberdayaan Kampung Bersinar	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. DELI SERDANG	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang	Zona 1 (Pantai Timur)	Sosialisasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan terhadap Generasi Muda	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. DELI SERDANG	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang	Zona 1 (Pantai Timur)	Orientasi dan Pengayaan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila terhadap Generasi Muda	Diakomodir Desk

2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. LABUHANBATU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Labuhanbatu	Zona 1 (Pantai Timur)	Pembangunan Kampung Bersinar	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KOTA MEDAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan	Zona 1 (Pantai Timur)	Biaya Rehabilitasi Masyarakat/Warga 150 orang warga Kota Medan 20 Titik Kelurahan Rawan Narkoba (Bersinar)	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. LABUHANBATU UTARA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan politik	Zona 1 (Pantai Timur)	Sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KOTA TANJUNG BALAI	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Zona 1 (Pantai Timur)	Sosialisasi Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat dalam Bentuk Partisipasi Pemilu 2024 kepada ASN, Tokoh Masyarakat, Agama, Adat dan Ormas dan Roadshow ke Sekolah - Sekolah (Pemilih Pemula SMS-sederajat)	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. SERDANG BEDAGAI	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serdang Bedagai	Zona 1 (Pantai Timur)	Pembangunan Kampung BERSINAR (Bersih Narkoba)	Diakomodir OPD dibahas di DESK
2023	Pra Musrenbang Zona	KOTA TANJUNG BALAI	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Zona 1 (Pantai Timur)	Fasilitasi Pelatihan Wawasan Kebangsaan bagi ASN	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. DELI SERDANG	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang	Zona 1 (Pantai Timur)	Orientasi Penguatan HAM bagi Perempuan	Belum Diakomodir Desk

2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. DELI SERDANG	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang	Zona 1 (Pantai Timur)	Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. LABUHANBATU UTARA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan politik	Zona 1 (Pantai Timur)	Pembangunan desa kampung bersinar di kabupaten labuhanbatu utara	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. LABUHANBATU UTARA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan politik	Zona 1 (Pantai Timur)	Sosialisasi/pembinaan dan pengawasan generasi muda, pemuda dan pelajar terhadap bahaya narkoba di kabupaten labuhanbatu utara	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KOTA TANJUNG BALAI	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Zona 1 (Pantai Timur)	Diklat Revolusi Mental bagi Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah	Belum Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. DELI SERDANG	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang	Zona 1 (Pantai Timur)	Lokakarya Manajerial bagi Pimpinan Ormas	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KOTA TANJUNG BALAI	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Zona 1 (Pantai Timur)	Sosialisasi dan Edukasi Dampak Buruk Penyalahgunaan Narkoba serta Deteksi Dini bagi ASN	Belum Diakomodir Bidang
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. PADANG LAWAS UTARA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara	Zona 2 (Pantai Barat)	SOSIALISASI KARAKTER BANGSA BAGI PEMUDA, PELAJAR DAN MASYARAKAT	Diakomodir Desk

2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. PADANG LAWAS	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Zona 2 (Pantai Barat)	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai Luhur Budaya Bangsa	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. PADANG LAWAS	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Zona 2 (Pantai Barat)	Gugus Tugas Gerakan Revolusi Mental Kabupaten Padang Lawas	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. PADANG LAWAS	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Zona 2 (Pantai Barat)	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. PADANG LAWAS	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Zona 2 (Pantai Barat)	Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. PADANG LAWAS	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Zona 2 (Pantai Barat)	Sosialisasi 4 Konsensus Dasar bagi Masyarakat	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. PADANG LAWAS	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Zona 2 (Pantai Barat)	Pembekalan Pelatihan Tenaga Penyuluh P4GN	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KOTA PADANGSIDIMP UAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	Zona 2 (Pantai Barat)	Penguatan Wawasan Kebangsaan Sebagai Upaya Pencegahan Paham Radikalisme Dan Intoleransi Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Swasta.	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KOTA PADANGSIDIMP UAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	Zona 2 (Pantai Barat)	Workshop Empat Pilar Kebangsaan Bagi Organisasi Kemasyarakatan Dan Partai Politik	Diakomodir Desk

2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. PADANG LAWAS UTARA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara	Zona 2 (Pantai Barat)	Desa Bersinar	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. MANDAILING NATAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Mandailing Natal	Zona 2 (Pantai Barat)	Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. MANDAILING NATAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Mandailing Natal	Zona 2 (Pantai Barat)	Pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KOTA SIBOLGA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga	Zona 2 (Pantai Barat)	Pembangunan Kampung bersinar (bersih Narkoba)	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. PADANG LAWAS	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Zona 2 (Pantai Barat)	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. PADANG LAWAS UTARA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara	Zona 2 (Pantai Barat)	SOSIALISASI WAWAWASAN KEBANGSAAN BAGI PEMUDA , PELAJAR DAN MASYARAKAT	Diakomodir Desk

2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. PADANG LAWAS UTARA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara	Zona 2 (Pantai Barat)	PENDIDIKAN BELA NEGARA BAGI PEMUDA, PELAJAR DAN MASYARAKAT	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. PADANG LAWAS UTARA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara	Zona 2 (Pantai Barat)	SOSIALISASI 4 (Empat) PILAR KEBANGSAAN BAGI PEMUDA, PELAJAR DAN MASYARAKAT -UUD 1945 -NKRI -BHINNEKA TUNGGAL IKA - PACASILA	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KOTA PADANGSIDIMPUAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	Zona 2 (Pantai Barat)	Integrasi Nilai-Nilai Bela Negara Bagi Naposo Nauli Bulung Sebagai Upaya Meningkatkan Pentingnya Suasana Rukun, Damai, Dan Aman Dalam Masyarakat.	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. PADANG LAWAS UTARA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara	Zona 2 (Pantai Barat)	SOSIALISASI P4GN	Diakomodir Desk

2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. SIMALUNGUN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun	Zona 3 (Dataran Tinggi)	Penyuluhan tentang bahaya Narkoba dalam mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Simalungun Peserta : Kec. Perdagangan, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kec. Tapan Dolok, Kec. Jorlang Hataran	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. TOBA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba	Zona 3 (Dataran Tinggi)	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. TOBA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba	Zona 3 (Dataran Tinggi)	Pendidikan Politik bagi Masyarakat	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. SAMOSIR	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Zona 3 (Dataran Tinggi)	Pembangunan kampung bersinar	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. SAMOSIR	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Zona 3 (Dataran Tinggi)	Pendidikan wawasan kebangsaan	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. SIMALUNGUN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun	Zona 3 (Dataran Tinggi)	Penyuluhan Pemahaman Wawasan Kebangsaan pada Generasi Muda	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. SIMALUNGUN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun	Zona 3 (Dataran Tinggi)	Penyuluhan Etika berpolitik Masyarakat	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. SIMALUNGUN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun	Zona 3 (Dataran Tinggi)	Peningkatan Koordinasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Diakomodir Desk

2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Zona 3 (Dataran Tinggi)	Kampung bersinar (bersih narkoba)	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. TOBA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba	Zona 3 (Dataran Tinggi)	Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. TOBA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba	Zona 3 (Dataran Tinggi)	Sosialisasi P4GN	Belum Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. KARO	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karo	Zona 3 (Dataran Tinggi)	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba (P4GN)	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. DAIRI	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Dairi	Zona 3 (Dataran Tinggi)	Pembangunan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. NIAS BARAT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Zona 4 (Kepulauan Nias)	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Di Wilayah Kabupaten Nias Barat	Diakomodir Desk
2023	Pra Musrenbang Zona	KAB. NIAS BARAT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Zona 4 (Kepulauan Nias)	Pencanangan 1 Kampung Bersinar (Bersih Narkoba) Di Kabupaten Nias Barat	Diakomodir Desk

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019 sd 2024, dan saat ini telah disusun Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dari RPJMN tersebut nantinya akan dilihat kaitannya dengan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara. Dalam meningkatkan dukungan Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara terhadap prioritas pembangunan Nasional antara lain:

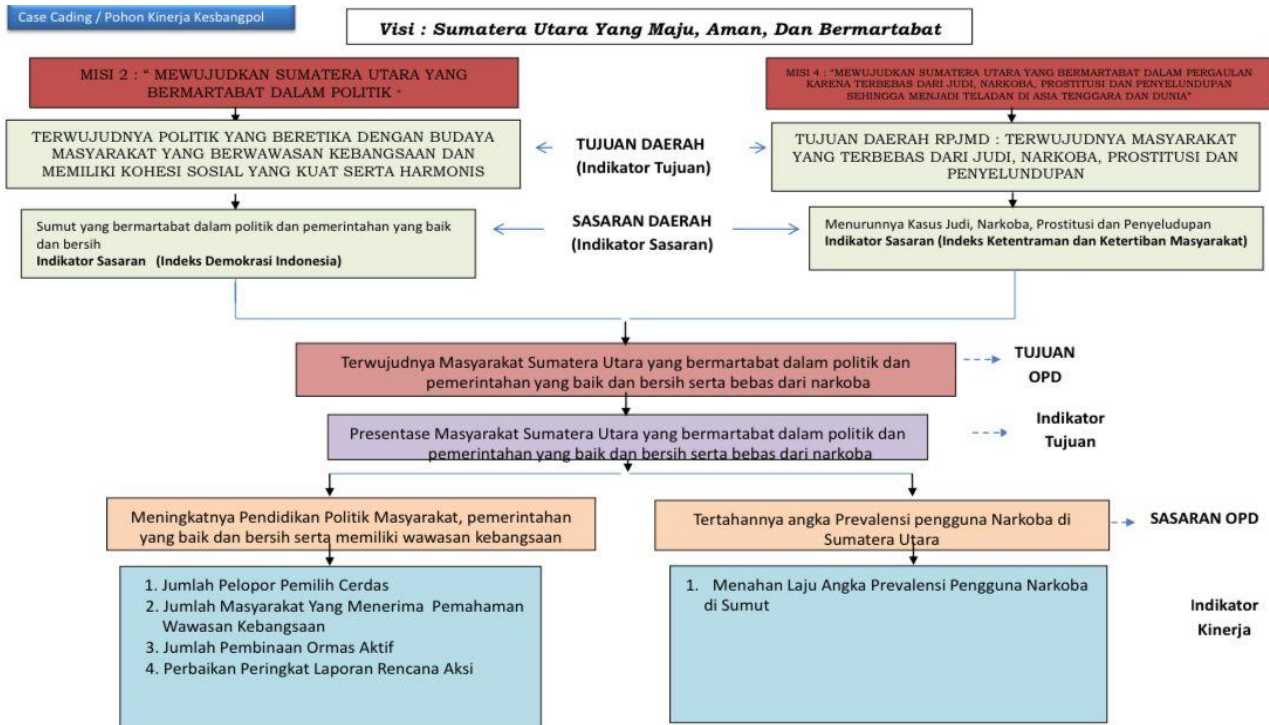
1. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang Berkinerja Tinggi;
2. Penguatan dan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama;
3. Penguatan Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebhinekaan;
4. Penguatan lembaga demokrasi
5. Penanganan konflik sosial

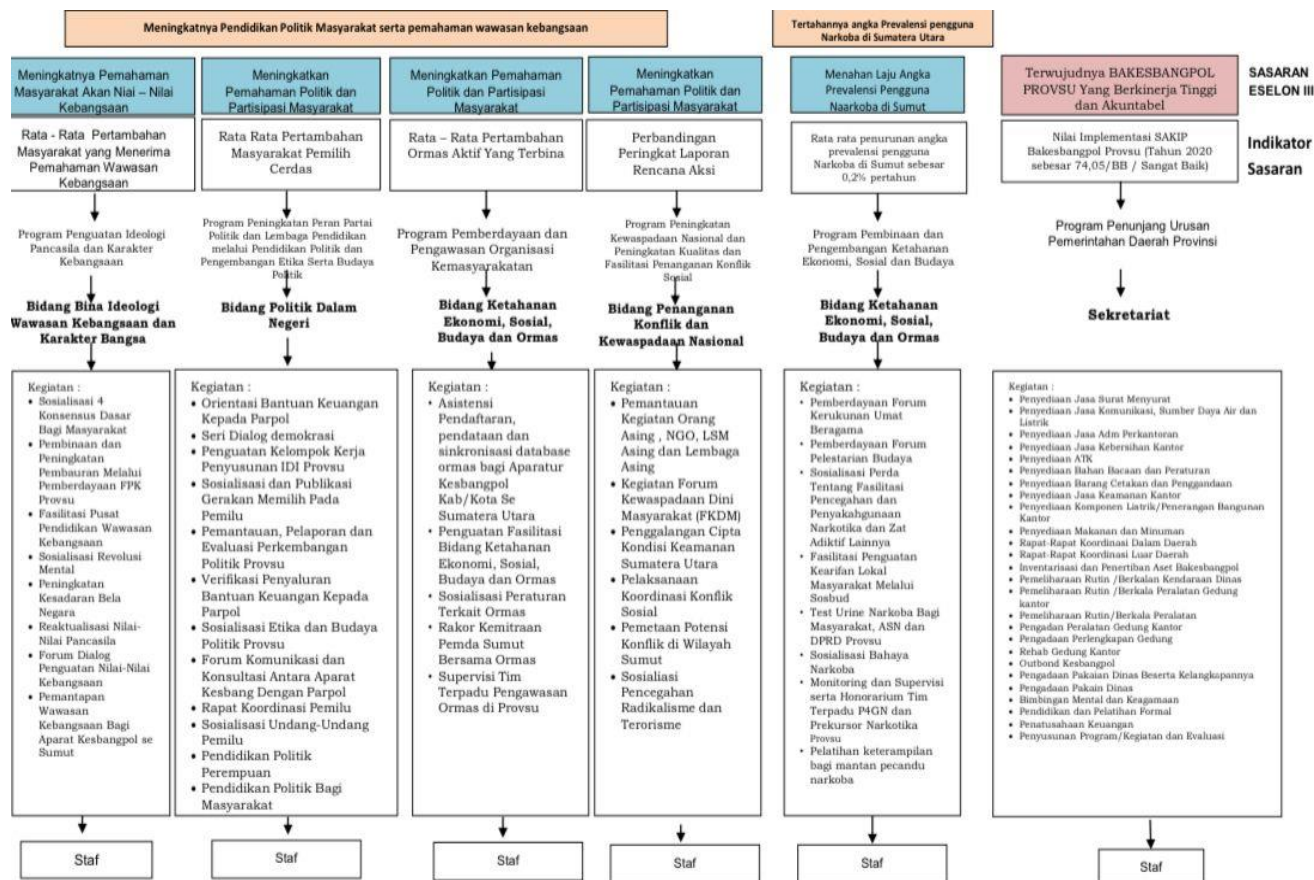
3.2 Tujuan dan Sasaran

Sehubungan dengan telah disusunnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara untuk Periode 2019– 2023, Untuk tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra OPD Bakesbangpol Provsu tahun 2019 – 2023 yang mengacu pada Perubahan RPJMD, dapat dijelaskan bahwa tujuan dan sasaran Bakesbangpol Provsu adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada tahun 2023
1.	Terwujudnya Politik yang beretika dengan budaya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis	Mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat dalam politik dan pemerintahan yang baik dan bersih	Jumlah Pelopor Pemilih Cerdas	550 orang
2.			Jumlah Pembinaan Ormas yang Aktif	50 ormas
3.			Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	7
4			Masyarakat yang menerima pemahaman Wawasan Kebangsaan	1300 org
5.	Terwujudnya Sumatera Utara yang bermartabat dan bebas dari Narkotika	Laju angka prevelensi pengguna narkotika di Sumatera Utara	Menahan laju angka prevelensi pengguna Narkotika di Sumatera Utara dengan memberi pendidikan bahaya Narkoba	5.7%

POHON KINERJA DAN CASCADING BAKESBANGPOL PROVSU





A. SASARAN PERTAMA Mewujudkan Masyarakat Sumut Yang Bermartabat Dalam Politik Dan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih

Dalam mendukung pencapaian Sasaran pertama ini terdapat 4 (empat) indikator didalamnya yakni : Jumlah Pelopor Pemilih Cerdas, Jumlah Pembinaan Ormas yang Aktif, Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi dan Masyarakat yang menerima pemahaman Wawasan Kebangsaan.

1. Jumlah Pelopor Pemilih Cerdas

Untuk Indikator yang kedua dimaksudkan untuk melihat sejauh mana Tingkat Kesadaran Pemahaman Masyarakat dalam Partisipasi menggunakan Hak Pilihnya pada Pesta Demokrasi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2020 dilaksanakan Pilkada serentak di seluruh Indonesia baik itu ditingkat Provinsi maupun di Kabupaten / Kota. Untuk Tingkat Provinsi ada 9 Provinsi yang melaksanakan Pilkada, untuk Kota ada 37 daerah sedangkan untuk Kabupaten ada 224 daerah yang menggelar Pilkada serentak dengan total 270 Wilayah yang menggelar Pilkada serentak se Indonesia. Selanjutnya untuk wilayah Sumatera Utara ada 23 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak yakni :

1. UNTUK KOTA

- Medan
- Binjai
- Sibolga
- Gunung Sitoli
- Pematang Siantar
- Tanjung Balai

2. UNTUK KABUPATEN

- Labuhan Batu Utara
- Pak – Pak Bharat
- Toba Samosir
- Samosir
- Asahan
- Karo
- Labuhan Batu
- Labuhan Batu Selatan
- Nias Utara
- Humbang Hasundutan
- Tapanuli Selatan
- Nias
- Nias Barat
- Mandailing Natal
- Serdang Bedagai
- Simalungun
- Nias Selatan

Dari data yang diperoleh bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara, untuk tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang terdendam berada di Kota Medan dengan Tingkat Partisipasi 45,80 Persen dan yang Tertinggi ada di Pak – Pak Bharat dengan Tingkat Partisipasi 88,9 Persen, untuk Tingkat Partisi masyarakat Sumatera Utara pada Pemilu Tahun 2020 secara kumulatif adalah sebesar 64,42%. Sementara untuk target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara untuk tingkat Partisipasi di angka 64 % yang berarti tercapai sesuai target dengan realisasinya, sebagai perbandingan untuk Nasional target yang ditetapkan sebesar 77,5 %. Tahun 2021 diakeranakan tidak ada Pemungutan Pemilihan Suara maka data diteruskan/ disamakan dengan keadaan Tahun 2020.

Perbandingan Target IKU dengan realisasi yang Ditetapkan Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) SKPD Bakesbangpol Provsu Tahun 2021 (masih menggunakan Indikator sebelum perubahan Renstra)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja (PK) 2021	Realisasi Ta 2021
Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	64%	64,42%

Sesuai Perubahan Indikator pada Perubahan RENSTRA untuk Tahun 2022 menjadi Jumlah Pelopor Pemilih Cerdas dengan target kinerja berjumlah 425 orang, sedangkan untuk tahun 2023 adalah berjumlah 550 orang dengan Tujuan Terwujudnya Politik yang beretika dengan budaya masyarakat yang berwawasan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis dan sasaran mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat dalam politik dan pemerintahan yang baik dan bersih, Bakesbangpol memiliki uraian kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target indikator tersebut, yaitu melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat bagi masyarakat, Forum komunikasi/koordinasi berupa dialog antara masyarakat dengan pengurus parpol, Sosialisasi Etika dan Budaya Politik bagi masyarakat, Rapat Kooordinasi antara DPR RI, DPRD PROVSU dan Parpol serta Rapat Tim dan FGD antara Tim Pokja Indeks Demokrasi Indonesia.

2. Jumlah Pembinaan Ormas Aktif

Indikator ini dimaksudkan untuk melihat berapa penambahan ormas yang aktif setiap tahunnya di Sumatera Utara. Sebagaimana diketahui sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 Ormas yang ada harus memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Kemendagri dan Kesbangpol Daerah. Namun seiring dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 maka ormas yang mendaftar sudah bisa mengajukan pendaftaran melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan untuk Pelaporan Ormas juga dipermudah. Disamping itu sebelum diberlakukannya Peraturan ini Perkumpulan dan Yayasan tidak termasuk kedalam kategori Ormas.

Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memantau keberadaan dan aktivitas Organisasi Masyarakat yang ada di wilayahnya.

Perbandingan Target IKU dengan realisasi yang Ditetapkan Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) SKPD Bakesbangpol Provsu Tahun 2021 (masih menggunakan Indikator sebelum perubahan Renstra)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja (PK) 2021	Realisasi Ta 2021
Meningkatnya Peran Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Pertambahan Ormas	100 % 20 ormas	370% 74 Ormas

Sesuai Perubahan Indikator pada Perubahan RENSTRA untuk Tahun 2022 menjadi Jumlah Pembinaan Ormas yang aktif dengan target 40 Ormas dan

untuk tahun 2023 sejumlah 50 ormas dengan Tujuan Terwujudnya Politik yang beretika dengan budaya masyarakat yang berwawasan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis dan sasaran mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat dalam politik dan pemerintahan yang baik dan bersih, uraian kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Supervisi Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Provinsi Sumatera Utara, melaksanakan Verifikasi Pendaftaran, Pendataan Ulang, Evaluasi dan Supervisi bantuan Dana Hibah Bagi ormas dan Asistensi bagi ASN Kabupaten / Kota tentang Ormas, Sosialisasi Peraturan Terkait Ormas dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Ormas di Provsu.

3. Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi

Untuk Penilaian Laporan Rencana Aksi masing – masing daerah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, penilaian ini dilaksanakan di tahun anggran berikutnya untuk menilai tahun anggaran sebelumnya. Penyusunan Laporan Rencana Aksi ini dilaksanakan setiap Triwulan dan disampaikan ke Kemendagri melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum untuk melihat sejauh mana koordinasi dan penanganan konflik yang dilaksanakan di daerah sehingga konflik yang ada tidak meluas dan meresahkan masyarakat. Untuk Sumatera Utara pada tahun 2017 berada pada peringkat 9 Nasional dan 2018 meningkat menjadi peringkat 8, akan tetapi pada tahun 2019 berada di peringkat 10 Nasional. Pada tahun 2020 berada pada peringkat 12.

Perbandingan Target IKU dengan realisasi yang Ditetapkan Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) SKPD Bakesbangpol Provsu Tahun 2021 (masih menggunakan Indikator sebelum perubahan Renstra)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET Perjanjian Kinerja (PK) 2021	Realisasi Ta 2021
Meningkatnya Peran Masyarakat Dalam Pembangunan	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	8	18

Sesuai Perubahan Indikator pada Perubahan RENSTRA untuk Tahun 2022 tidak ada perubahan bahas indikator yaitu Perbaikan peringkat Laporan Rencana Aksi dengan target peringkat 8, sedangkan tahun 2023 memiliki target peringkat 7 dengan Tujuan Terwujudnya Politik yang beretika dengan budaya masyarakat yang berwawasan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis dan sasaran mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat dalam politik dan pemerintahan yang baik dan bersih. Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya target indikator adalah Membentuk Tim Kewaspadaan dini daerah, Pemantauan orang asing dan NGO, Pelakasaan PUSKOMIN (Pusat Komunikasi dan Informasi), Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik Sosial Penggalangan Cipta Kondisi dengan Fasilitasi Pertemuan dan koordinasi FORKOPIMDA, Fasilitasi Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat serta berkoordinasi dengan Kabupaten Kota terkait isu isu strategis kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial bekerjasama dengan OPD terkait provsu dan Tim Aparat Keamanan lainnya.

- **Masyarakat yang menerima pemahaman Wawasan Kebangsaan**

Indikator yang pertama dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya Rasa Berbangsa dan Bernegara. Dengan adanya pemahaman masyarakat akan wawasan kebangsaan diharapkan rasa persaudaraan dan kebersamaan diantara masyarakat dapat lebih baik lagi. Untuk itulah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara merasa perlu melakukan kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan pemberian pemahaman wawasan kebangsaan di tengah – tengah masyarakat Sumatera Utara yang pluralisme ini baik dari Suku, Agama, Ras maupun Golongan. Bentuk – bentuk kegiatan yang biasa dilakukan seperti Sosialisasi, Dialog maupun memberdayakan Forum yang ada.

Awal Tahun 2021, Bakesbangpol memulai kegiatan dengan fasilitasi KEGIATAN Latsitardanus (Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara) XLII Indonesia yang kebetulan berlokasi di Sumatera Utara untuk Tahun 2021, kegiatan berlokus di Kab. Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, Medan, Langkat, Binjai dan Simalungun diikuti oleh 850 peserta Taruna Kepolisian, TNI AU, AL dan AD serta 100 mahasiswa gabungan dari beberapa universitas di Sumut. Dilanjutkan dengan Gerakan Sumut Bersih dengan menerbitkan Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/38/INST/2021

Tanggal 24 Agustus 2021 tentang Gerakan Sumut Bersih di Kawasan Wisata dan melaksanakan pilot project di kota Medan yaitu Istana Maimun dengan memberikan Sosialisasi kepada masyarakat pengunjung, menanam 100 pohon, memasang spanduk dan banner serta memasang tong sampah baru sesuai jenis sampah. Melaksanakan Sosialisasi Pensisikan Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan peningkatan pembauran melalui Pemberdayaan FPK (Forum Pembauran Kebangsaan). Pada tahun 2021 yang lalu kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara seperti tahun – tahun sebelumnya pelaksanaan kegiatan direncanakan melalui Upacara Hari Bela Negara dengan mengundang TNI, Polri, ASN, Organisasi Kemasyarakatan, Pelajar dan unsur lainnya yang dilaksanakan di Lapangan terbuka. Namun dikarenakan situasi pandemi kegiatan dilaksnakan melalui virtual mempergunakan meeting zoom dan dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara. Meskipun dilaksanakan secara virtual, bukan berarti mengurangi makna dari pelaksanaan kegiatan ini justru dengan situasi yang ada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih bisa tetap melaksanakan kegiatan Hari Bela Negara ke-73 Tahun 2021. Kegiatan ini mengingatkan kita akan Pada tanggal yang sama tahun 1948, terjadi Agresi Militer Belanda II, dimana Belanda melancarkan serangan ke Yogyakarta yang merupakan ibukota Indonesia saat itu. Dengan jatuhnya Ibukota serta penangkapan Kepala Negara, maka dibentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Padang, Sumatera Barat. Terbentuknya PDRI ini merupakan tonggak sejarah dalam menjaga tetap tegaknya NKRI. PDRI menunjukkan kepada dunia, bahwa eksistensi NKRI masih ada dan berdaulat.

Bela negara, menjadi hal dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Hal ini berdasarkan UUD 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. “Dari kedua ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Bela Negara merupakan Hak dan Kewajiban Konstitusional WNI. Semua anak bangsa harus tergerak dan bergerak untuk bela negara sesuai dengan ladang pengabdian masing-masing.

Adapun nilai-nilai dasar yang dikembangkan dalam bela negara, agar menjadi landasan sikap dan perilaku warga negara adalah cinta Tanah Air,

sadar berbangsa dan negara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara.

Perbandingan Target IKU dengan realisasi Yang Ditetapkan Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) SKPD Bakesbangpol Provsu (masih menggunakan Indikator sebelum perubahan Renstra)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja (PK) 2021	Realisasi Ta 2021
Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Menerima Pemahaman Wawasan Kebangsaan	100 % (2000 org)	70% (1450 org)

sebagaimana telah disebutkan diatas, yang menyebabkan tidak tercapainya target sebagaimana ditetapkan pada tahun 2021 adalah adanya pembatasan untuk berkumpul dan melaksanakan kegiatan yang menghadirkan banyak orang dikarenakan pandemi covid – 19 masih berlangsung sampai bulan Desember 2021 yang lalu sehingga kegiatan yang tadinya bisa menghadirkan ribuan orang harus dibatasi dan dilaksanakan secara sederhana tanpa mengurangi makna kegiatan dimaksud.

Sesuai Perubahan Indikator pada Perubahan RENSTRA untuk Tahun 2022 menjadi Jumlah Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan dan target 1275 orang, sedangkan tahun 2023 memiliki target sejumlah 1300 orang dengan Tujuan Terwujudnya Politik yang beretika dengan budaya masyarakat yang berwawasan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis dan sasaran mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat dalam politik dan pemerintahan yang baik dan bersih, uraian kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target indikator adalah Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental, Gerakan Sumut Bersih di Kawasan Wisata, Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan serta Fasilitasi Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan.

- **Menahan Laju Angka Prevalensi Pengguna Narkotika di Sumatera Utara**

Dari 14 Juta lebih jumlah penduduk Sumut saat ini, 1 juta diantaranya merupakan pengguna Narkoba. Tahun 2020 Sumatera Utara menduduki Peringkat 3 di Indonesia dalam hal penggunaan Narkoba, sekarang pada tahun 2021 menjadi peringkat 1 atau rangking 1 terbanyak pecandu narkoba dengan lebih dari satu juta orang. Sumut mengalahkan DKI Jakarta yang pada waktu survei tahun lalu menduduki peringkat pertama. Kalimantan Timur jauh lebih menurun dan juga Sumatera Selatan menduduki posisi kedua (hasil survei BNN dan BPS).

Sesuai Permendagri No 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dijelaskan dalam pasal 2 Pelaksanaannya dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik hal ini menjadi dasar Bakesbangpol wajib menambahkan Indikator Kinerja Utama terkait pencegahan dan penanggulangan Narkoba. Adapun Indikator terbaru yang ditambahkan pada Perubahan RENSTRA adalah Menahan Laju angka prevelensi pengguna narkotika di Sumatera Utara dengan target berkurang 0,2 % setiap tahunnya dan untuk Tahun 2022 adalah 5,9% sedangkan tahun 2023 adalah 5,7 %, adapun uraian kegiatan yang dapat mendukung capaian target serta dijelaskan pada pasal 4 pada Permendagri No. 12 Tahun 2019 bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melakukan fasilitasi melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Penyusunan Perda mengenai pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal ini Pergub Nomor 19 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provsu No. 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya serta Instruksi Gubernur Nomor 188.54/17/INST/2021 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Sosialisasi, Bakesbangpol Provsu pada tahun 2021 melaksanakan kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba di 20 kali kegiatan di kab kota yaitu Kota Binjai, Kota Medan, Kab. Asahan, Kota Sibolga, Kab. Tapanuli Selatan, Kota Pematang Siantar, Kab. Simalungun,

dan Kab. Tapanuli Utara. Selain itu juga dilaksanakan Pelatihan/Konselor Adiksi Korban, Pelatihan Barbershop Bagi Mantan Pecandu Narkoba, dan Rakor P4GN.

3. Pelaksanaan Deteksi Dini, Bakesbangpol mengadakan 1050 alat test urine yang akan digunakan di lingkungan ASN dan Masyarakat.
4. Pemberdayaan Masyarakat, Bakesbangpol memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pelestarian Budaya, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan yang merupakan jembatan atau penyambung koordinasi antara Pemprovsu dengan tokoh tokoh utama pemimpin masyarakat.
5. Bakesbangpol bekerja sama dengan BNN, Kepolisian dan Komisi A DPRD SU berencana membentuk Tim Penggiat Anti Narkoba di Kelurahan dan Desa Kab Kota, sehingga telah ditetapkan menjadi Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2022 dan 2023 dengan tema Pelaksanaan 300 Kampung Bersinar.

Tahun 2022 Bakesbangpol Provsu akan melaksanakan kembali kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2021, serta akan melaksanakan kegiatan 50 Kampung Bersinar karena merupakan Kegiatan Strategis Daerah sehingga wajib dilaksanakan dan diselesaikan demi mencapai target 300 kampung bersinar yang akan dilanjutkan dan diselesaikan di akhir Tahun 2023, selain itu Bakesbangpol Provsu juga akan melaksanakan Bantuan Biaya Rehabilitasi Bagi Mantan Pecandu Narkoba Bagi Keluarga Tidak Mampu, serta Pelatihan Keterampilan (*lifeskill*) juga bagi Mantan Pecandu Narkoba, sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan bagi pecandu Narkoba untuk diobati dan sembuh bahkan tidak terjerumus kembali ke permasalahan Narkoba.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023

Tahun anggaran 2023 diusulkan 6 (Enam) Program dengan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan dan total pagu yang diusulkan sebesar Rp 161.861.167.184,- Dari 6 (Enam) Program terdapat 1 (satu) Program Rutin dan 5 (lima) Program Utama, secara ringkas untuk rencana kerja tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi	18.981.168.194	6
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa	6.299.922.990	5
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	41.130.000.000	4
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	12.551.645.000	3
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	69.674.776.000	3
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	13.223.655.000	5
Total		161.861.167.184	26

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Program ini meliputi kegiatan rutin penunjang pegawai dan pekerjaan kantor yaitu :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2023 adalah

- Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)
- Pembentukan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) sesuai Perpres No. 13 Tahun 2021
- Sosialisasi 4 Konsensus dasar bagi masyarakat
- Sosialisasi Reaktualisasi Nilai nilai Pancasila
- Forum Dialog Penguatan Nilai nilai Kebangsaan Bersama Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda
- Sosialisasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Aparat, Kesbangpol dan Forum Forum Strategis dan Masyarakat Kab/Kota Se Sumut
- Sosialisasi Revolusi Mental Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat
- Pelaksanaan Hari Bela Negara serta Peningkatan Kesadaran Bela Negara
- Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
- Pembinaan dan Peningkatan Pembauran Melalui Fasilitasi Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Kegiatan yang diusulkan Tahun 2023 adalah :

- Orientasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- Penguatan Kelompok Kerja Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara
- Sosialisasi dan Publikasi Gerakan Memilih pada Pemilu/Pilpres dan Pilkada
- Pendidikan Politik bagi Kader-Kader PKK dan Organisasi Wanita
- Pendidikan Politik kepada Masyarakat Kab/Kota

- Verifikasi PAW (Pergantian Antar Waktu) Anggota DPRD Kab/Kota se Sumatera Utara
- Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Provsu
- Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Parpol
- Rapat koordinasi Persiapan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak
- Orientasi dan Bimtek Tim Pemantau Perkembangan Politik Kab/Kota dalam rangka Pilkada Serentak
- Sosialisasi Etika dan Budaya Politik di provsu
- Forum Komunikasi Parpol dengan Kesbangpol Provsu
- Pemetaan Perkembangan Politik di Sumut
- Rapat koordinasi Pemilu/Pilpres Kab/Kota
- Sosialisasi Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Rapat Koordinasi DPR RI, DPRD SU, DPD DAPIL SUMUT dan Parpol.
- Hibah KPU dan Bawaslu

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Kegiatan yang diusulkan untuk Tahun 2023 adalah :

- Monitoring dan Evaluasi Ormas di Lingkungan Pemprovsu
- Rapat Asistensi Pemberdayaan Ormas bagi Aparatur Kesbangpol Kab/Kota
- Sosialisasi Peraturan Perundangan Ormas
- Rapat Tim Terpadu Pengawasan Ormas
- Rapat Koordinasi/Silaturahmi Ormas dengan Gubernur
- Hibah bantuan ormas yang sudah mengusulkan proposal yaitu Aisyiyah Sumut, DPD Majelis Buddhayana Indonesia Sumut, Himpunan Ahli Rias Pengantin Melati Sumut, IKA BKPRMI Sumut, Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI), Lembaga Survey Sumut, Nadhlatul Ulama Sumut, Parsadaan Pomparan Tiga Sinaga Dohot Boru, Persatuan Batak

Islam Sumut, Persatuan Persaudaraan Putera Solo Sumut dan Persatuan Wredatama RI Sumut.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Pada Tahun 2023 merupakan lanjutan penambahan Program ini menjadi salah satu Indikator Utama Bakesbangpol dalam mendukung Misi Gubernur Nomor 4 yaitu Terwujudnya Masyarakat yang Bebas dari Narkoba dan menjadi salah Satu Kegiatan Strategis Daerah (KSD) mengingat Sumatera Utara merupakan peringkat 1 pengguna Narkoba di Indonesia, dengan indikator Menahan Laju Prevalensi Pengguna Narkoba di Sumatera Utara. Adapun kegiatan yang diusulkan Tahun 2023 adalah :

- Pelaksanaan 262 DESA BERSINAR (Bersih Dari Narkoba)
- Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama
- Fasilitasi Forum Pelestarian Budaya
- Sosialisasi Bahaya Narkoba Di Kab/Kota
- Penyuluhan Tatanan Kehidupan Baru Covid 19
- Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi di Masa Pandemi Covid 19
- Pelatihan/Konselor Adiksi Korban Penyalahgunaan NAPZA
- Rapat Koordinasi P4GN
- Tim Terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- Pelatihan Kepada Mantan Pecandu Narkoba (*Lifeskill*)
- Bantuan Biaya Rehabilitasi Narkoba Untuk Keluarga Tidak Mampu

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Kegiatan yang diusulkan Tahun 2023 adalah :

- Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
- Penanganan Konflik Sosial

- Pusat Komunikasi dan Informasi
- Tim Kewaspadaan Dini
- Pencegahan Radikalisme dan Terorisme
- Penggalangan Cipta Kondisi
- Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Sesuai yang diusulkan dalam dokumen Rencana Kerja ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara mengusulkan 6 (Enam) Program dengan 26 (Dua Puluh Enam) Sub kegiatan untuk tahun 2022 mendatang. Dari keseluruhan Program ada bersifat rutin maupun menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Untuk melihat lebih rinci nama – nama Program, kegiatan dan Pagu Anggaran pada masing – masing kegiatan dapat dilihat pada lampiran Tabel T. C29 ataupun T.C31 pada dokumen Rencana Kerja ini.

pel T.C 29 (Tabel 2.1)													
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN													
PENCAPAIAN RENSTRA s/d TAHUN 2021													
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK PROVINSI SUMATERA UTARA													
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
							Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan 2 tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2								8=(7/6)		10=(5+7+9)	11=(10/4)	
				BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK PROVSU									
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terciptanya Pelayanan Administrasi Pekantoran	12 bulan	12 bulan	12	12	100%	SAKIP BB	42 Bulan	42 Bulan
				Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 BULAN	36 bulan	12	12	100%	12 BULAN	42 Bulan	42 Bulan
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	9 dokumen	18 dokumen	12	12	100%	9 dokumen	36 dokumen	36 dokumen
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 BULAN	36 bulan	12	12	100%	12 BULAN	42 bulan	42 bulan
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	12	12	100%	100%	100%	100%

				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Pendukung Pelaksana Tugas	14 Orang	11 orang	12	12	100%	14 Orang	11 orang	11 orang
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan	3 dokumen	9 dokumen	3 doc	3 doc	100%	3 dokumen	9 dokumen	9 dokumen
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		5 kali	5 kali	12	12	100%	5 kali	5 kali	5 kali
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Frekuensi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	6 kali	5 kali	12	12	100%	6 kali	5 kali	5 kali
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 BULAN	36 bulan	12	12	100%	12 BULAN	42 bulan	42 bulan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	12	12	100%	100%	50 %	50 %
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	12	12	100%	100%	50 %	50 %
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	100%	50 %	50 %
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	12	12	100%	100%	50 %	50 %
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	1 koran	100%	12	12	100%	1 koran	50 %	50 %
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	100%	12	12 bulan	100%	100%	50 %	50 %
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 BULAN	36 bulan	12	12	100%	12 BULAN	42 bulan	42 bulan

				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda Pos Jasa Surat Menyurat	100%	100%	12	12	100%	100%	50 %	50 %
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	12	12	100%	100%	50 %	50 %
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	14 Orang	11 orang	12	12	100%	14 Orang	11 org	11 org
				Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 BULAN	36 bulan	12	12		12 BULAN	42 bulan	42 bulan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	10 unit	10 Unit	14 unit	14 unit	100%	10 unit	6 unit	6 unit
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100%	100%	12	12	100%	100%	50 %	50 %
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan kantor yang direhabilitasi	1 Gedung	1 gedung	12	12	100%	1 Gedung	0	0
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tersedianya kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi dan Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1275 orang	2610 orang	1300 or	100 org	7.6%	1275 orang	2660 org	2660 org
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja diBidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	1 Dokumen	3 Dokumen	12	12		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
				Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	1 forum	1 Forum	12	12		1 forum	1 forum	1 forum
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	0	0	12	12		200 Orang	0	0

					Kebangsaan								
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Kali/ 1500 Orang	2 Kali/ 2610 Orang	12	12		3 Kali/ 1275 Orang	2660 org	2660 org
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	0	12	12		12 Bulan	-	-
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tersedianya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	425 orang	900 orang	64%	64%	100%	425 orang	40,63	40,63
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantaua Situasi Politik Daerah	Jumlah Kebijakan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantaua Situasi Politik Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	12	12		2 Dokumen	1 dokumen	1 dokume n
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantaua Situasi Politik Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantaua Situasi Politik	11 Parpol	11 Parpol	12	12		11 Parpol	9 Parpol	9 Parpol

					Daerah								
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penignkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantaua Situasi Politik Daerah	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	12	12		300 orang	-	-
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penignkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantaua Situasi Politik Daerah	0	0	12	12		2 kali	-	-
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Pembinaan Organisasi Masyarakat yang Aktif	40 ormas	74 ormas	20 orma		100%	40 ormas	17,89	17,89
				Penyusunan Baha Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 bulan	36 Bulan	12 bulan	12 bulan		50 Orang	42 bulan	42 bulan
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	40 ormas ;	74 ormas ;	12 bulan	12 bulan		40 ormas ; 40 angkatan	74 Ormas	74 Ormas
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	12 Bulan	36 Bulan	12 bulan	12 bulan		12 Bulan	42 Bulan	42 Bulan

				Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Tersedianya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	5.9%	6,5%	12 bulan	12 bulan	100%	6.1 %	6.5	6.5
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyelahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daera	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyelahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Forum	2 Forum	12 bulan	12 bulan		2 Forum	2 Forum	2 Forum
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyelahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daera	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyelahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daera	30000 Orang	6255Orang	12 bulan	12 bulan		30000 Orang	3500 org	3500 org
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyelahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daera	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyelahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daera	0	0	12 bulan	12 bulan		12 Bulan	-	-
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	8 peringkat	18 peringkat	9 Peringkat	9 Peringkat	100%	8 peringkat	Peringkat 18	Peringkat 18
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta	2 Kegiatan	2 kegiatan	12 bulan	12 bulan		2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan

					Penanganan Konflik di Daerah yang di susun								
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen kerja Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun	1 forum	1 forum				1 forum	1 forum	1 forum
				Pelaksanaan Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	12 bulan	36 bulan				3 Tim; 12Bulan (Penanganan Konflik Sosial, Satgas Pengungsi, Puskomin)	42 bulan	42 bulan
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Kegiatan (Konflik Sosial dan Pemantauan Orang Asing)	2 Kegiatan (Konflik Sosial dan Pemantauan Orang Asing)				2 Kegiatan (Konflik Sosial dan Pemantauan Orang Asing)	2 Kegiatan	2 Kegiatan
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	0					12 Bulan	-	-

					Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PENUTUP

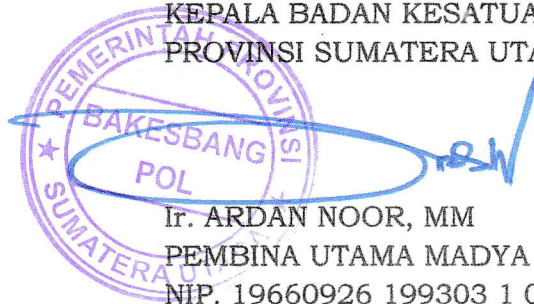
Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 merupakan tahun ketiga atas pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara periode 2019 - 2023. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Politik Provinsi Sumatera Utara ini akan dijadikan dasar dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang bersumber dari APBD Sumatera Utara Tahun 2023, disamping itu untuk bahan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan kedepannya.

Melalui dokumen ini juga diharapkan Penetapan Prioritas Pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan terintegritas sehingga bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Utara.

Medan,

2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA UTARA



Ir. ARDAN NOOR, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660926 199303 1 010